

Tahun	2023	Kelompok	-
Judul Inovasi	CESAR MELAYANI	Tanggal Mulai Inovasi	-
Instansi Pelaksana	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	URL Bukti Inisiasi Inovasi	LINK
Wilayah			
Nama Inovator	ANGGRIANI, S.T., M.T.		

Detail Proposal

1. Ringkasan

Program Sistem Pelayanan Kolaborasi CSR (Corporate Social Responsibility) ini diinisiasi karena pentingnya penyaluran bantuan CSR perusahaan dilakukan secara kolaboratif dan tepat sasaran. Kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak melalui kemitraan antara Pemerintah Daerah, badan usaha, Lembaga/Organisasi masyarakat, perguruan tinggi, media dan masyarakat pengguna akhir. Kolaborasi ini tentu kolaborasi Phentaheliks yang mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah maupun program yang menjadi arahan pemerintah pusat tentunya dalam rangka pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs). Program ini selain kepedulian terhadap masyarakat yang tertimpa musibah juga memberikan dampak pada peningkatan pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor termasuk di dalam pengentasan kemiskinan ekstrem, pencegahan stunting dan perbaikan fasilitas umum yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat. Ide kolaborasi ini bersifat supporting terhadap kolaborasi pihak swasta dalam melaksanakan kewajibannya dalam rangka penyelenggaraan CSR. Contohnya dalam rangka pengurangan angka Anak Tidak Sekolah pada sektor Pendidikan, Kolaborasi CSR Provinsi Sulawesi Selatan telah mengalokasikan bantuan kepada 12 (dua belas) Kabupaten/Kota untuk mengurangi jumlah anak tidak sekolah. (selengkapnya terlampir di proposal)

Link -

2. Ide Inovatif

Perusahaan yang beraktivitas khususnya di Sulawesi Selatan pada prinsipnya sudah melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Namun pada kondisinya di lapangan, alokasi CSR ini belum terdistribusi secara merata, bahkan masih banyak masyarakat yang belum tersentuh padahal mereka bertempat tinggal di lingkungan yang terdampak oleh aktivitas perusahaan. Kondisi lain yang dihadapi adalah banyaknya usulan-usulan bantuan CSR yang masuk ke perusahaan baik dari Pemerintah Daerah maupun dari Lembaga/organisasi masyarakat yang tidak teridentifikasi secara prioritas. Oleh karena itu, pemerintah punya kewajiban untuk mengontrol pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan agar dapat terdistribusi dengan baik, merata dan yang paling penting adalah apakah seluruh perusahaan telah melaksanakan kewajibannya seperti yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan mengidentifikasi usulan bantuan CSR yang merupakan prioritas untuk dilaksanakan sesuai dengan arahan pemerintah pusat dan program pembangunan nasional. Oleh karena itu, di Sulawesi Selatan dibentuk Forum Tanggung Jawab Sosial dan Perusahaan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan/Corporate Social Responsibility yang difasilitasi oleh Biro Perekonomian. Namun, keberadaan Tim Fasilitasi ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pada akhirnya pada tahun 2020 akhirnya direvisi berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: 895/IV/Tahun 2021 yang ketuanya berada di OPD oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Prov. SulSel. bersama beberapa instansi terkait lainnya untuk membentuk dan meramu ulang terkait

penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Kemudian terbitlah peraturan gubernur nomor 2 tahun 2021 tentang penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan Sulawesi Selatan yang kemudian diikuti dengan pembentukan Forum Koordinasi -TSLP yang diketuai oleh Drs. La Tunreng, MM sebagai Ketua Tim yang mengkoordinasikan program dan usulan kepada Badan Usaha dan Tim Fasilitasi yang kemudian diketuai oleh Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai tim verifikator. Adapun tujuan dari pembentukan Forum Koordinasi dan Tim Fasilitasi ini adalah memadu selaraskan program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) dari kalangan Swasta, BUMN, BUMD dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Sulawesi Selatan. Dengan adanya kolaborasi Forum Koordinasi dan Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, pelayanan terkait usulan bantuan CSR masyarakat dilaksanakan SATU PINTU dan lebih terarah. Adapun tujuan lainnya adalah untuk melakukan dan memperkuat pendataan terkait program-program apa saja yang telah dilakukan oleh perusahaan sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan program yang dilakukan oleh pemerintah. Hal yang utama dari program ini adalah Forum koordinasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan wadah bagi perusahaan dalam menyerasikan kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan dengan program dan kegiatan pemerintah daerah. Penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan ini sebagai pelaksanaan sinergisitas program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan program pembangunan daerah. Selama ini, belum adanya sinergi antara penyaluran bantuan CSR perusahaan dan program- program prioritas pemerintah yang juga ditujukan untuk kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Banyak terjadi tumpang tindih program-program yang dilaksanakan di masyarakat dan belum adanya pemerataan penyaluran bantuan sehingga masih ada masyarakat yang belum tersentuh oleh bantuan-bantuan. Dengan adanya kolaborasi dalam pelayanan usulan bantuan CSR mampu menghimpun seluruh usulan-usulan dari semua kalangan di masyarakat utamanya dengan menggunakan aplikasi e-csr yang telah dibuat dapat diakses oleh siapa saja. Program kolaborasi ini membutuhkan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak yang terlibat.

Link <https://www.youtube.com/watch?v=ik95QOADI0A>

3. Signifikansi

Forum Koordinasi dan Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan melaksanakan tugas berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Pengusulan bantuan CSR dari Pemerintah Daerah (provinsi, kabupaten/kota) ditujukan kepada Tim Fasilitasi untuk diverifikasi kemudian diteruskan kepada Forum Koordinasi. Forum Koordinasi yang akan meneruskan kepada badan usaha untuk diproses. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi serta transparansi dalam pelayanan pengusulan bantuan CSR maka dibuat Aplikasi E-CSR. Aplikasi ini dibuka untuk umum dan dapat diakses oleh siapa saja termasuk masyarakat umum untuk menginput usulan bantuan. Aplikasi dapat diakses melalui link <https://csr.sulselprov.go.id/> . Beberapa program telah difasilitasi melalui pengusulan dari aplikasi e-csr ini seperti Bantuan untuk Anak Tidak Sekolah di Kabupaten/Kota, Bantuan untuk Korban Bencana Alam Sulawesi Barat, Bantuan Bencana Alam di Cianjur. Buffer Stock untuk korban bencana dll. Bantuan yang diberikan secara kolaboratif ini memberikan dampak yang positif karena bantuan dapat tersalurkan secara efektif dan efisien kepada masyarakat. Dalam rangka evaluasi pelaksanaannya, dilakukan rapat evaluasi setiap bulan dengan menghadirkan stakeholder yang masuk dalam Forum Koordinasi dan Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Beberapa kali juga diadakan rapat konsolidasi untuk penyamaan persepsi. Setiap penyaluran bantuan CSR kepada masyarakat dibuat laporan pelaksanaan untuk kemudian dilaporkan kepada pimpinan terkait pelaksanaannya baik kepada Ketua Forum Koordinasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta pimpinan badan usaha yang terlibat maupun kepada pimpinan pemerintah daerah dalam hal ini ketua Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Gubernur Sulawesi Selatan. Dengan kolaborasi ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengusulkan sebanyak 62 (enam puluh

dua) program prioritas pembangunan Sulawesi Selatan untuk pemberdayaan masyarakat kepada Forum Koordinasi untuk disinergikan dengan program CSR pihak swasta. Program tersebut diantaranya perbaikan dan pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur seperti perbaikan jalan, pembangunan rumah ibadah, dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau.

Link

https://drive.google.com/drive/folders/1BtfMLnmOWwSvL3w4E08j4L6aKfa_mZkV?usp=share_link

4. Kontribusi Terhadap Pencapaian TPB

Secara normatif, adanya Kolaborasi ini berkontribusi terhadap semua Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) karena program-program yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan ini bergerak di semua sektor diantaranya program yang mendukung pengentasan kemiskinan, pencegahan dan penurunan angka stunting, pengembangan dan perbaikan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, dan program lainnya yang masuk dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu contoh adalah kolaborasi dalam pemberian bantuan dalam rangka penurunan angka anak tidak sekolah yang bertajuk “PASTI BERAKSI” di provinsi Sulawesi selatan yang masuk dalam salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di sektor Pendidikan. Sebanyak 12 (dua belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang dilibatkan dalam program ini yaitu, Kota Makassar, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Bone, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Gowa, Kabupaten Luwu dan Kabupaten Tana Toraja. Bantuan berupa perlengkapan sekolah yang diserahkan adalah sebanyak 480 paket. Selain itu bantuan juga diberikan pada bencana banjir di Tamang Royo Jeneponto melalui perbaikan rumah yang terkena musibah.

Link <https://www.youtube.com/watch?v=r5gcbYHQUzE>

5. Adaptabilitas

Program kolaborasi ini dapat diterapkan pada setiap Pemerintah Daerah dengan merangkul pihak swasta dalam rangka pencapaian visi misi kepala daerah dan pelaksanaan program prioritas. Kolaborasi ini hanya membutuhkan penguatan regulasi dari pimpinan utamanya kepala daerah dan dukungan pihak swasta/perusahaan. Meskipun melibatkan banyak pihak, konsep yang diterapkan juga cukup sederhana antara proses yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi maupun proses yang dilakukan oleh Forum Koordinasi. Kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pihak swasta juga bukan hal yang baru.

Link -

6. Keberlanjutan

Program kolaborasi ini melibatkan sumber daya manusia dari pemerintah daerah dan pihak swasta/badan usaha. Dalam rangka pengusulan bantuan CSR, pemerintah daerah terlibat untuk verifikasi usulan yang bersinergi dengan program prioritas pemerintah daerah. Program ini juga membutuhkan keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat / Organisasi Masyarakat dalam pengusulan program/kegiatan yang perlu dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat. Karena ini merupakan kolaborasi terkait CSR Pihak swasta maka sumber pendanaannya berasal dari perusahaan / pihak swasta itu sendiri di mana bantuan diserahkan langsung dari perusahaan kepada penerima bantuan. Forum Koordinasi dan Tim Fasilitasi hanya menjalankan tugas fasilitasi yaitu mengkoordinasikan dan memverifikasi usulan-usulan bantuan. Strategi yang dilakukan agar inovasi ini tetap berlanjut adalah dengan terus memperbaiki koordinasi dan komunikasi dengan pihak swasta. Peraturan terkait kemudahan berinvestasi di Sulawesi Selatan yang telah disusun dapat memberikan support terhadap pihak swasta untuk dapat berinvestasi secara berkelanjutan di Sulawesi Selatan dan melaksanakan kewajibannya yaitu penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Secara rutin mengevaluasi kendala-kendala yang dialami dengan melakukan rapat evaluasi juga dapat menjadi strategi dalam keberlanjutan kolaborasi ini. Kolaborasi

CSR ini telah disosialisasikan kepada masyarakat Sulawesi Selatan di Kabupaten/Kota. Usulan bantuan kepada tim fasilitasi dan forum koordinasi akan terus berlanjut dengan adanya kemudahan dalam pengusulan yaitu melalui aplikasi yang ada. SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah disusun menjadi kekuatan dan dasar dalam pelaksanaan pelayanan pada kolaborasi ini. Hal lain yang akan dilakukan adalah update terkait data base perusahaan yang beraktivitas di Sulawesi Selatan serta data alokasi CSR setiap perusahaan atau pihak swasta.

Link https://drive.google.com/file/d/1j6j6z1ypwTdp61k_OTqrQvn9lJUHbok/view?usp=share_link

7. Kolaborasi Pemangku Kepentingan

Kolaborasi dalam pelaksanaan program ini melibatkan Forum Koordinasi Perangkat Daerah sebagai Pembina dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pengarah. Sedangkan dalam proses fasilitasi yaitu penyelarasan program CSR pihak swasta dan program prioritas pembangunan daerah serta fasilitasi usulan bantuan dari masyarakat dilaksanakan oleh Forum Koordinasi yang terdiri Perwakilan badan usaha serta Tim Fasilitasi yang beranggotakan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Beberapa perusahaan yang sudah terlibat dalam kolaborasi ini antara lain Yayasan Kalla Group, Astra Group, Bank Sulselbar, Regional Head 4 Pelindo, PT. Vale, Bank Indonesia, PT. Pupuk Indonesia, PT. Comextra Mayora, PT. IKI, PT. Huadi, Makassar Tene, PT. Japfa Comfeed, PT. Semen Tonasa dan Kanwil VI. Pegadaian.

Link https://drive.google.com/file/d/1f6G9U_nJPZWRHrauIlt3NsIrXlRfmWli/view?usp=share_link